



**SEKRETARIAT DAERAH  
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**

**INDIKATOR  
KINERJA INDIVIDU  
BIRO ORGANISASI**

---

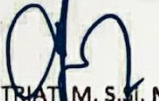
**TAHUN 2022**

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU  
TAHUN 2022**

**NAMA JABATAN** : Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja  
**TUGAS POKOK** : Melaksanakan Penyusunan Kebijakan, Koordinasi Pelaksanaan Dan Evaluasi Kebijakan Dibidang Akuntabilitas , Reformasi Birokrasi dan Evaluasi Budaya Kerja  
**FUNGSI** : 1. Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan, Pelaksanaan, Evaluasi Dan Pelaporan Dibidang Akuntabilitas Kinerja  
 2. Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan, Pembinaan Evaluasi Reformasi Birokrasi  
 3. Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan, evaluasi Budaya Kerja

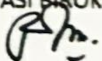
NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Kinerja	Rata-rata Komponen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah ( <i>hasil penilaian Inspektorat</i> )	Diukur dengan rata-rata nilai komponen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah yang diukur oleh Inspektorat	Inspektorat daerah/ Akuntabilitas Kinerja Subag
2	Meningkatnya Kualitas Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah	Rata-rata Komponen Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah ( <i>hasil penilaian Inspektorat</i> ).	Diukur dengan rata-rata nilai komponen Kualitas laporan Kinerja Perangkat Daerah yang diukur oleh Inspektorat	Inspektorat daerah/ Akuntabilitas Kinerja Subag
3	Meningkatnya Akurasi Data . Pengukuran Kinerja Pemda	Nilai Kinerja Komponen Pengukuran Kinerja Pemda	Diukur dengan nilai komponen Akurasi datan Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah yg diukur oleh Kepmenpan RB	KeMenpan dan RB/ Akuntabilitas Kinerja Subag
4	Meningkatnya Capaian Kinerja Pemda	Nilai Komponen Capaian Kinerja Pemda.	Diukur dengan nilai komponen Kualitas laporan Kinerja Pemerintah Daerah yg diukur oleh Kepmenpan RB	KeMenpan dan RB/ Akuntabilitas Kinerja Subag
5	Meningkatnya Capaian Road map RB	% Capaian penerapan Road Map RB	Diukur berdasarkan rata-rata ketercapaian indikator yang ditetapkan untuk mendukung RB	Subag RB
6	Meningkatnya Penerapan Budaya Kerja Pada Perangkat daerah	% Perangkat daerah yang menerapkan nilai-nilai Budaya Kerja	Diukur dari kepatuhan OPD dalam menginternalisasikan edaran tentang budaya kerja	Subag Budaya Kerja

KEPALA BIRO ORGANISASI



FITRIATI M. S. Si. M. Si.  
NIP. 19730513 199703 2 005

KEPALA BAGIAN  
REFORMASI BIROKRASI DAN AKUNTABILITAS KINERJA



Dra. Reni Delafina, S.s  
NIP. 19651030 198903 2012

## INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TAHUN 2022

**Nama Jabatan** : **Analisis Kebijakan Ahli Muda**

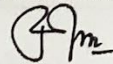
**Tugas Pokok** : Melakukan riset dan analisis kebijakan, memberikan rekomendasi kebijakan, melakukan komunikasi, koordinasi, advokasi, konsultasi dan negosiasi kebijakan dan melakukan publikasi hasil kajian kebijakan.

**Fung** :

1. Mengumpulkan dan mengidentifikasi masalah kebijakan
2. Menyusun agenda kegiatan analisis kebijakan
3. Analisis masalah dan menyusun alternatif kebijakan
4. Mensosialisasikan dan memantau pelaksanaan kebijakan
5. Mengolah, menilai dan melaporkan hasil evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan.

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan/Penjelasan	Sumber Data
1	Meningkatnya pemahaman aparatur terkait Reformasi Birokrasi	Jumlah aparatur yang ditingkatkan pemahamannya	Diukur berdasarkan jumlah peserta pada kegiatan Bimtek Pokja 8 Area Perubahan, Sosialisasi Reformasi Birokrasi dan Sosialisasi Road Map RB Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.	Bagian Reformasi dan Akuntabilitas Kinerja Biro Organisasi
2	Meningkatnya rencana aksi perangkat daerah yang selaras dengan road map	Persentase rencana aksi perangkat daerah yang selaras dengan road map	Diukur berdasarkan jumlah perangkat daerah yang rencana aksinya selaras dengan road map reformasi birokrasi dibagi dengan jumlah total perangkat daerah di lingkungan pemerintah provinsi Sumatera Barat dikali dengan 100 %	Bagian Reformasi dan Akuntabilitas Kinerja Biro Organisasi
3	Meningkatnya OPD yang mengimplementasikan rencana aksi	Persentase OPD yang mengimplementasikan rencana aksi	Diukur berdasarkan jumlah OPD yang mengimplementasikan rencana aksi pada kegiatan monev rencana aksi akhir tahun anggaran dibagi dengan jumlah total perangkat daerah di lingkungan pemerintah provinsi Sumatera Barat dikali dengan 100 %	Bagian Reformasi dan Akuntabilitas Kinerja Biro Organisasi dan Inspektorat
4	Meningkatnya kinerja agen perubahan pada perangkat daerah	Jumlah perubahan lingkup OPD yang dibuat dan dilaksanakan	Diukur dengan cara menghitung jumlah perubahan yang dibuat dan dilaksanakan oleh agen perubahan pada perangkat daerah	Bagian Reformasi dan Akuntabilitas Kinerja Biro Organisasi dan Balitbang

KABAG RB DAN AKUNTABILITAS KINERJA,



**Dra. RENI DELAFINA, SS**  
NIP. 19651030 198903 2 012

ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA,



**WELLI, SE**  
NIP. 19670422 199403 1 003

### INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

Nama Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda

Tugas Pokok : Melaksanakan penyusunan kebijakan, koordinasi pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang akuntabilitas Kinerja

Fungsi : 1. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan akuntabilitas kinerja  
 2. Penyiapan bahan pengordinasian pelaksanaan kebijakan akuntabilitas kinerja  
 3. Pelaksanaan Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan akuntabilitas kinerja

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Baseline (2021)	Formula Perhitungan/ Penjelasan	Sumber Data
1	Meningkatnya Perangkat Daerah yang Tujuan dan Sasarannya berorientasi Outcome	Persentase PD yang tujuan dan sasarnya berorientasi Outcome	46 OPD	(Jumlah PD yang tujuan dan sasarnya Outcome/Jumlah OPD) X 100%	Data Diolah
2	Meningkatnya Perangkat Daerah yang indikator kinerjanya memenuhi kriteria SMART	Persentase PD yang indikator kinerjanya SMART	46 OPD	(Jumlah PD yang indikator kinerjanya SMART/Jumlah OPD) X 100%	Data Diolah
3	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan OPD	Persentase PD yang dokumen perencanaan kinerjanya selaras	-	(Jumlah PD yang dokumen PK dan RKT selaras dengan Renstra dan IKU/Jumlah OPD) X 100%	Data Diolah
4	Meningkatnya Perangkat Daerah yang data pengukuran kinerjanya akurat	Persentase PD yang rata-rata nilai komponen pengukuran kinerjanya > 15%	90,00	Diukur berdasarkan nilai komponen pengukuran kinerja PD dari hasil evaluasi dari inspektorat daerah (tahun n)	Inspektorat Daerah
5	Meningkatnya Perangkat Daerah yang capaian kinerjanya	Persentase PD yang rata-rata nilai komponen capaian kinerjanya >10%	74,00	Diukur berdasarkan nilai komponen capaian kinerja PD dari hasil evaluasi tahun n dari inspektorat daerah	Inspektorat Daerah
6	Meningkatnya Perangkat Daerah yang Laporan kinerjanya disampaikan tepat waktu	Persentase PD yang menyampaikan Laporan Kinerja tepat waktu	46 OPD	(Jumlah PD yang menyampaikan Laporan kinerja < 31 Januari/Jumlah OPD) X 100%	Data Diolah

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Baseline (2018)	Formula Perhitungan/ Penjelasan	Sumber Data
7	Meningkatnya pemenuhan instrumen perolehan data target dan realisasi kinerja Pemda	Jumlah target kinerja yang jelas cara penetapannya	-	Jumlah target kinerja Pemda yang ditetapkan dalam dokumen PK yang jelas cara penetapannya (tahun n)	Data Diolah
		Jumlah data realisasi kinerja yang jelas cara penetapannya	-	Jumlah realisasi kinerja Pemda yang ditetapkan dalam dokumen PK yang jelas cara penetapannya (tahun n)	Data Diolah
8	Meningkatnya data capaian kinerja Pemerintah Daerah yang dimonev	Jumlah data capaian kinerja yang dimonev	-	cukup jelas (sesuai dengan indikator dalam dokumen PK tahun n)	Data Diolah
9	Meningkatnya Data dukung capaian kinerja Pemda yang dikumpulkan tepat waktu	Jumlah data dukung capaian kinerja yang dikumpulkan tepat waktu	-	cukup jelas (sesuai dengan indikator dalam dokumen PK n-1)	Data Diolah
10	Meningkatnya pemahaman tim penyusunan Laporan kinerja	Jumlah anggota tim yang diberikan pemahaman	-	Jumlah anggota tim penyusunan Laporan Kinerja yang diberikan pemahaman	Data Diolah

### INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 2022

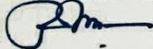
Nama Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda

Tugas Pokok : Melakukan analisis kebijakan, memberikan rekomendasi kebijakan, melakukan komunikasi, koordinasi, konsultasi, dan negosiasi kebijakan dan melakukan publikasi hasil kegiatan kebijakan

Fungsi : 1. Mengumpulkan dan mengidentifikasi masalah kebijakan  
2. Menyusun agenda kegiatan analisis kebijakan  
3. Analisis masalah dan menyusun alternatif kebijakan  
4. Mensosialisasikan dan memantau pelaksanaan kebijakan  
5. Mengolah, menilai dan melaporkan hasil evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan

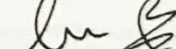
No	Sasaran	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan / Penjelasan	Sumber Data
1	Tersedianya Panduan dan kebijakan tentang budaya kerja	Jumlah panduan dan kebijakan yang dibuat	Diukur berdasarkan jumlah hasil kebijakan yang dibuat	Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja
2	Pembinaan pelaksanaan budaya kerja pada Organisasi Perangkat Daerah	- Jumlah OPD Prov yang dibina dalam menerapkan nilai-nilai budaya kerja - Jumlah Kab/Kota yang dibina dalam menerapkan nilai-nilai budaya kerja	Diukur berdasarkan jumlah OPD dan Kab/Kota yang mengikuti kegiatan pembinaan dan sosialisasi pelaksanaan budaya kerja	Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja

KEPALA BAGIAN REFORMASI BIROKRASI DAN  
AKUNTABILITAS KINERJA



Dra. RENI DELAFINA, S.S  
NIP. 19651030 198903 2 012

ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA



AMIRIDWAN, S.Kom  
NIP. 1971092120070011002

### INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

Nama Jabatan : Analis Penyusunan Laporan Kinerja

Tugas Pokok : Melakukan kegiatan yang meliputi Pengumpulan, Pengklasifikasian, dan Penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang Laporan akuntabilitas kinerja

Fungsi :

- a. Menganalisa bahan perumusan kebijakan Akuntabilitas Kinerja.
- b. Menyalpkan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja
- c. menganalisa bahan penyusunan perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
- d. menganalisa draft Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
- e. Menyiapkan bahan pembinaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota
- f. menganalisa data pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Akuntabilitas Kinerja
- g. Melaksanakan tinjauan lapangan terkait data dan masalah yang harus dianalisa.
- h. Melakukan Koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk kelancaran Pelaksanaan tugas.

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan/Penjelasan	Sumber Data
1	Terlaksananya monitoring dan verifikasi dokumen Capaian Kinerja OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja dan Capaian Kinerja OPD yang di verifikasi	diukur dari Jumlah Laporan Kinerja OPD tahun n-1 dan Dokumen Realisasi Rencana Aksi Triwulan I s.d IV Tahun n yang diverifikasi	Data Diolah
		Jumlah Dokumen Laporan Kinerja dan Capaian Kinerja OPD yang di kumpulkan	diukur dari Jumlah Laporan Kinerja OPD tahun n-1 dan Dokumen Realisasi Rencana Aksi Triwulan I s.d IV Tahun n yang diserahkan OPD baik secara Langsung ke Biro Organisasi maupun melalui Aplikasi esr.menpan.go.id	Data Diolah
2	Terlaksananya evaluasi dan verifikasi dokumen Capaian Kinerja Provinsi Sumatera Barat	a. Jumlah Indikator Kinerja Pemerintah Provinsi yang dievaluasi dan dianalisa Capalanya	Diukur dari Jumlah Indikator Kinerja Gubernur yang telah di lakukan pengukuran dan dianalisa sesuai sistematika penyusunan Laporan Kinerja yang diatur dalam Pergub 71 Tahun 2020. Indikator Kinerja yang dimaksud terdapat pada Dokumen PK Tahun n-1, yang jumlahnya dibagi per masing-masing Tim Penyusunan Analisa Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.	Data Diolah
		b. Jumlah Indikator Kinerja Pemerintah Provinsi yang di verifikasi data dukungnya	diukur dari Jumlah Indikator Kinerja Gubernur yang telah diverifikasi Informasi dan Data dukungnya. Indikator Kinerja tersebut terdapat pada Dokumen PK Gubernur Tahun n-1. Data dan informasi pendukung yang telah diverifikasi digunakan untuk melengkapi analisa capaian kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat .	Data Diolah

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan/Penjelasan	Sumber Data
3	Terlaksananya evaluasi, verifikasi dan pengumpulan dokumen Perencanaan Kinerja OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	a. Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang dievaluasi dan diverifikasi	diukur dari Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja OPD yang disusun pada Tahun n yang telah dievaluasi dan verifikasi Dokumen Perencanaan tersebut diantaranya Renstra, Perjanjian Kinerja Tahun n, Rencana Aksi Tahun n, RKT Tahun n+1, Dokumen IKU dan IKI	Data Diolah
		b. Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang dikumpulkan	diukur dari Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja OPD yang disusun pada Tahun n yang dikumpulkan, baik yang diserahkan OPD secara langsung ke Biro Organisasi maupun yang diupload ke esr.menpan.go.id	Data Diolah
4	Terlaksananya Monitoring entryan Dokumen SAKIP OPD pada Aplikasi e-SAKIP	Jumlah Aktivitas Monitoring entryan Dokumen SAKIP OPD pada aplikasi e-SAKIP	diukur dari jumlah/ frekuensi aktifitas memonitoring entrian dokumen SAKIP OPD pada aplikasi e-SAKIP (sakip.sumbarprov.go.id dan esr.menpan.go.id)	Data Diolah



**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU**

**Nama Jabatan :** Analis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan

**Tugas Pokok :** Melakukan kegiatan yang meliputi Pengumpulan, pengklasifikasian dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan

- Fungsi :**
1. Menyusun perencanaan program dan kegiatan
  2. Menyajikan bahan kegiatan RB
  3. Menganalisa Data Reformasi Birokrasi dan bahan penumusan kebijakan RB
  4. Menyajikan bahan dokumen money pelaksanaan 8 area RB
  6. Pengelolaan administrasi keuangan
  7. Menganalisa dokumen tindaklanjut evaluasi RB
  8. Penyusunan Pelaporan kegiatan

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan/Penjelasan	Sumber Data
1	Tercapainya penyusunan perencanaan program kegiatan	Jumlah perencanaan kerja kegiatan	Diukur berdasarkan jumlah rencana kerja kegiatan yang disusun	Biro Organisasi
2	Tercapainya penyajian bahan pembinaan, kegiatan, koordinasi, rapat, pertemuan	Jumlah bahan kegiatan, koordinasi,	Diukur berdasarkan jumlah bahan kegiatan yang disiapkan	Perangkat daerah dan Kabupaten/Kota
3	Terlaksananya pelayanan teknis dalam persuratan untuk kelancaran program dan kegiatan	Jumlah pelayanan teknis	Diukur berdasarkan jumlah pelayanan teknis yang diselesaikan	Perangkat daerah dan Kabupaten/Kota
4	Terlaksananya pengelolaan dan pelaporan pertanggungjawaban administrasi keuangan	Jumlah dokumen administrasi keuangan	Diukur berdasarkan jumlah dokumen administrasi keuangan dan laporan	Biro Organisasi
5	Tercapainya penghimpunan dan teranalisa data reformasi birokrasi	Jumlah data reformasi birokrasi	Diukur berdasarkan jumlah data reformasi birokrasi yang dihimpun dan dianalisis	Perangkat daerah dan Kabupaten/Kota
6	Tercapainya penghimpunan bahan dan teranalisa dokumen money pelaksanaan RB	Jumlah Penerapan RB dan Hasil Evaluasi	Diukur berdasarkan jumlah dokumen money yang dianalisis	Perangkat daerah dan Kabupaten/Kota
7	Tercapainya penghimpunan dan analisa dokumen tindaklanjut evaluasi reformasi birokrasi	Jumlah dokumen tindaklanjut evaluasi RB	Diukur berdasarkan jumlah dokumen tindaklanjut evaluasi RB	Perangkat daerah dan Kabupaten/Kota
8	Terlaksananya penyusunan bahan untuk pembuatan pelaporan pelaksanaan kegiatan	Jumlah pelaporan kegiatan	Diukur berdasarkan jumlah pelaporan kegiatan yang disusun	Biro Organisasi

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 2022**

**Nama Jabatan** : Pengadministrasi Umum  
**Tugas Pokok** : Melakukan analisis kebijakan, memberikan rekomendasi kebijakan, melakukan komunikasi, koordinasi, konsultasi, dan negosiasi kebijakan dan melakukan publikasi hasil kegiatan kebijakan  
**Fungsi** : 1. Mengumpulkan dan mengidentifikasi masalah kebijakan  
 2. Menyusun agenda kegiatan analisis kebijakan  
 3. Analisis masalah dan menyusun alternatif kebijakan  
 4. Mensosialisasikan dan memantau pelaksanaan kebijakan  
 5. Mengolah, menilai dan melaporkan hasil evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan / Penjelasan	Sumber Data
1	Terlaksananya Pengadministrasian Subbag Akuntabilitas Kinerja	Jumlah SK Pendukung kegiatan yang selesai	Diukur berdasarkan jumlah SK yang dibuat	Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja
2		Persentase Surat yang selesai di photo chopy	Diukur berdasarkan jumlah surat yang dihalikan	Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja
3		Jumlah Nota dinas Pencairan Dana Kegiatan yang selesai disusun	Diukur berdasarkan jumlah Nota Dinas yang dibuat	Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja
4		Jumlah kwitansi kegiatan yang diketik	Diukur berdasarkan jumlah kwitansi yang diketik	Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja
5		Jumlah dokumen pendukung penyusunan laporan kegiatan yang diarsipkan	Diukur berdasarkan jumlah dokumen pendukung penyusunan laporan kegiatan yang diarsipkan	Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja
6		Jumlah daftar hadir pelaksanaan kegiatan yang dibuat	Diukur berdasarkan jumlah daftar hadir yang dibuat	Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja
7		Jumlah data realisasi keuangan yang dikumpulkan dan diarsipkan	Diukur berdasarkan jumlah data realisasi keuangan yang dikumpulkan	Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja

### INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

Nama Jabatan : Analis Kebijakan Pertama

Tugas Pokok : Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan/Penjelasan	Sumber Data
1	Tersedianya rekomendasi kebijakan Penataan Jabatan	Jumlah rekomendasi kebijakan dalam bentuk telaah staf yang disusun	Diukur dari jumlah masalah terkait penataan jabatan yang diminta oleh pimpinan untuk dianalisis dan diberikan rekomendasi kebijakan dalam bentuk telaahan staf yang dapat diambil oleh pimpinan dalam menindaklanjuti permasalahan tersebut	Isu kebijakan yang dianalisis
		Jumlah rekomendasi kebijakan dalam bentuk Policy Paper yang disusun	Diukur dari jumlah masalah terkait penataan jabatan yang diminta oleh pimpinan untuk dianalisis dan diberikan rekomendasi kebijakan dalam bentukpolisi brief yang dapat diambil oleh pimpinan dalam menindaklanjuti permasalahan tersebut	Isu kebijakan yang dianalisis
1	Terlaksananya monitoring pelaksanaan kebijakan Penataan Jabatan	Laporan monitoring pelaksanaan kebijakan penataan jabatan	Diukur dari jumlah kebijakan yang diminta pimpinan untuk dilakukan monitoring terhadap	Kebijakan
1	Terlaksananya advokasi kebijakan Penataan Jabatan	Laporan hasil advokasi kebijakan	Diukur dari jumlah kebijakan yang perlu diadvokasikan	Kebijakan

### INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

Nama Jabatan : Pengelola Barang Milik Daerah

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan/Penjelasan	Sumber Data
1	Terlaksananya Koordinasi, Pengumpulan dan pengolahan data aset, kehadiran pegawai negeri sipil dilingkungan Biro organisasi	Jumlah Dokumen Laporan tahunan aset yang dientrikan	Diukur berdasarkan jumlah laporan yang disusun	Biro Asset
		Jumlah Dokumen Laporan tahunan aset yang dientrikan	Diukur berdasarkan jumlah dokumen yang telah dientrikan	Biro Asset
2	Terlaksananya verifikasi tambahan penghasilan PNS di Lingkungan Biro Organisasi	Jumlah instrumen Data dan rekapitulasi tambahan penghasilan PNS yang dikumpulkan dan diolah	Diukur berdasarkan instrumen tambahan penghasilan yang dihimpun	Laporan Harian
		Jumlah Dokumen data kehadiran pegawai negeri sipil biro yang dikumpulkan dan .. .	Diukur berdasarkan laporan kehadiran pegawai	Daftar kehadiran

### INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

Nama Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Tugas Pokok : Melaksanakan urusan ketatausahaan Biro

- Fungsi
- 1 melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian
  - 2 melaksanakan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan
  - 3 melaksanakan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtangga, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan
  - 4 melaksanakan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan
  - 5 melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup biro
  - 6 melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan Rencana Strategis (RESTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Penetapan Kinerja (TAPKIN), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) lingkup biro
  - 7 melaksanakan pengolahan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan
  - 8 melaksanakan perencanaan dan pemeliharaan perlengkapan biro
  - 9 melaksanakan perencanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
  - 10 melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN)

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan/Penjelasan	Sumber Data
1	tersusunnya dokumen perangkat daerah tepat waktu	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	Diukur dari dokumen perangkat daerah tersebut yang disampaikan tepat waktu ke OPD Penanggung Jawab	Data Diolah
2	Meningkatnya Keselarasan antar dokumen perencanaan perangkat daerah	Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan perangkat daerah	$X = \frac{a + b + c + d}{4}$ $a = \frac{\sum \text{sasaran dan Indikator Kinerja pada PK}}{\sum \text{sasaran dan Indikator Kinerja pada Renstra}} \times 100\%$ $b = \frac{\sum \text{sasaran dan Indikator Kinerja pada RKT}}{\sum \text{sasaran dan Indikator Kinerja pada Renstra}} \times 100\%$ $c = \frac{\sum \text{sasaran, Indikator Kinerja dan target tahunan pada Rencana Aksi}}{\sum \text{sasaran, Indikator Kinerja dan target pada PK}} \times 100\%$ $d = \frac{\sum \text{Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Renja}}{\sum \text{Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Renja}} \times 100\%$	Data Diolah
3	Meningkatnya Implementasi Dokumen Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dokumen Perangkat Daerah dengan Dokumen Penganggaran	(Jumlah sub kegiatan yang dilaksanakan/dalam DPA : Jumlah kegiatan yang diusulkan dalam dokumen Renja) X 100%	Data Diolah
4	tersusunnya dokumen pelaporan organisasi tepat waktu	Jumlah Dokumen Pelaporan Organisasi yang disusun tepat waktu	Diukur dari dokumen pelaporan perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	Data Diolah

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan/Penjelasan	Sumber Data
5	meningkatnya kesesuaian laporan dengan pedoman penyusunan laporan	Persentase Dokumen Pelaporan yang sesuai dengan pedoman penyusunan laporan	Diukur berdasarkan hasil evaluasi dari OPD yang meminta laporan tersebut. Dengan rumusan sebagai berikut: (Jumlah laporan yang hasil evaluasi/verifikasinya 2 : Jumlah semua laporan) X 100%	Data Diolah
6	Meningkatnya Pemanfaatan laporan terhadap perencanaan perangkat daerah	Persentase Hasil evaluasi yang sesuai dengan pedoman penyusunan laporan	(Jumlah rekomendasi hasil evaluasi SAKIP terkait komponen pelaporan yang ditindaklanjuti : Jumlah rekomendasi hasil evaluasi SAKIP terkait komponen pelaporan) X 100%	Data diolah
7	meningkatnya kualitas penatausahaan keuangan	Persentase pengurangan kesalahan hasil verifikasi keuangan	((Jumlah kesalahan hasil verifikasi keuangan tahun n - Jumlah kesalahan hasil verifikasi keuangan tahun (n-1)): Jumlah kesalahan hasil verifikasi keuangan tahun (n-1)) X 100%	Data diolah
8	meningkatnya tindak lanjut temuan pemeriksaan	persentase temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti	(Jumlah temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti : jumlah temuan pemeriksaan) X 100%	Inspektorat/ Data diolah
9	meningkatnya ASN yang mengisi LHKPN/LHKASN tepat waktu	Jumlah ASN yang mengisi LHKPN/LHKASN tepat waktu	Jumlah ASN yang mengisi LHKPN/ LHKASN tepat waktu	Data diolah
10	ketersediaan data kepegawaian yang akurat	persentase ketersediaan data kepegawaian	(Jumlah pegawai yang data kepegawaiannya lengkap : Jumlah pegawai) X 100%	Data Diolah
11	tersusunnya uraian tugas ASN sesuai regulasi	Dokumen Uraian Tugas yang sesuai regulasi	Diukur berdasarkan jumlah dokumen uraian tugas yang sudah disusun sesuai regulasi	Data diolah
12	ketersediaan dokumen Analisa Jabatan dan Peta Jabatan yang sesuai dengan regulasi	Dokumen Anjab yang sesuai dengan regulasi	Diukur berdasarkan jumlah dokumen anjab yang sudah disusun sesuai regulasi	Data diolah
		Dokumen Peta Jabatan yang sesuai dengan Regulasi	Diukur berdasarkan jumlah dokumen peta jabatan yang sudah disusun sesuai regulasi	Data Diolah
13	tersusunnya dokumen SOP sesuai	Dokumen SOP yang sesuai regulasi	Diukur berdasarkan jumlah dokumen SOP yang sudah disusun sesuai regulasi	Data Diolah
14	Meningkatnya Kapasitas SDM pemberi layanan	Jumlah SDM layanan yang Kompeten	Diukur berdasarkan Jumlah ASN layanan yg mengikuti Diklat/Sosialisasi/Bimtek	Data Diolah

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan/Penjelasan	Sumber Data
15	Meningkatnya BMD yang diadakan dan dipelihara	Jumlah BMD yang diadakan	Diukur dari jumlah BMD yang diadakan tahun n	Data Diolah
		Jumlah BMD yang dipelihara	Diukur dari jumlah aset yang dipelihara tahun n	Data Diolah
16	meningkatnya pengamanan BMD sesuai regulasi	Persentase aset yang diinventaris	(Jumlah Aset yang sudah diinventarisir : jumlah aset keseluruhan) X 100%	Data Diolah
17	Tersusunnya data kebutuhan pengembangan kapasitas SDM	Dokumen Data Riwayat Pengembangan Kapasitas SDM yang tersusun	Diukur dari jumlah dokumen berisikan Data Kebutuhan pengembangan Kapasitas SDM yang tersusun	Data Diolah
18	tersusunnya rencana kebutuhan pengembangan kapasitas SDM	Dokumen Rencana Kebutuhan Pengembangan Kapasitas SDM yang tersusun	Diukur dari jumlah dokumen Rencana Kebutuhan pengembangan Kapasitas SDM yang tersusun	Data Diolah

### INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

- Nama Jabatan** : JF Sub-subbagian Pelayanan Publik (Analis Kebijakan Ahli Muda)
- Tugas Pokok** : melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi dan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pelayanan Publik
- Fungsi** :
- 1 menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang Pelayanan Publik
  - 2 menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan standar pelayanan internal dan pelayanan publik;
  - 3 menyiapkan bahan fasilitasi forum komunikasi pendayagunaan aparatur negara dan daerah
  - 4 menyiapkan bahan pemantauan dan pelaporan di bidang Pelayanan Publik
  - 5 mengkaji dan analisis pelaksanaan pelayanan publik
  - 6 mengelola pengaduan pelayanan publik untuk diproses lebih lanjut
  - 7 menyusun standar pelayanan internal dan pelayanan publik
  - 8 mengkoordinasikan pelayanan dasar
  - 9 melaksanakan fasilitasi forum komunikasi pendayagunaan aparatur negara dan daerah
  - 10 melaksanakan monitoring di bidang Pelayanan Publik

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan/Penjelasan	Sumber Data
1	Meningkatnya Inovasi Pelayanan Publik yang dibina	Jumlah UKPP yang dibina	Diukur dari Jumlah UKPP yang dibina	Data Diolah
2	Meningkatnya UKPP yang dinilai dalam Kompetisi Pelayanan Publik	Jumlah UKPP yang dinilai	Diukur dari jumlah UKPP yang dinilai	Data Diolah
3	Meningkatnya Pembinaan SKM pada UKPP	Jumlah UKPP yang dibina	Pelaksanaan pembinaan yang dilakukan	Data Diolah
4	Meningkatnya UKPP yang melaksanakan SKM	Jumlah UKPP yang melaksanakan SKM	Diukur dari Jumlah UKPP yang melaksanakan SKM	OPD
5	Meningkatnya UKPP yang menyusun Standar Pelayanan	Jumlah UKPP yang menyusun Standar Pelayanan	Diukur dari jumlah UKPP yang menyusun standar Pelayanan	Data Diolah



**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU**

Nama Jabatan : **JF Sub-subbagian Tatalaksana Pemerintahan (Analisis Kebijakan Ahli Muda)**

Tugas Pokok : perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi dan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Tata Laksana Pemerintahan

Fungsi 1 melaksanakan koordinasi penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah

2 menyiapkan bahan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), pedoman tata naskah dinas, pakaian dinas dan standarisasi sarana dan prasarana dinas

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan/Penjelasan	Sumber Data
1	Pembinaan Penyusunan SOP dan Probis	Jumlah OPD yang dibina	Jumlah OPD yang dibina	Data Diolah
2	Evaluasi SOP dan Probis Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang SOP dan Probisnya dievaluasi	Jumlah Perangkat Daerah yang SOP dan Probisnya dievaluasi	Data Diolah
3	Tersedianya Kebijakan Mekanisme Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Kebijakan terkait Mekanisme Kerja	(sudah jelas sesuai dengan indikator PK)	Data Diolah
4	Terlaksananya Monev terhadap Pelaksanaan Mekanisme Koordinasi Kerja	Jumlah Perangkat Daerah yang di Monev	Diukur dari Jumlah Perangkat Daerah yang di Monev	Data Diolah
5	Terlaksananya pembinaan pelaksanaan mekanisme koordinasi kerja	Jumlah Pembinaan yang dilaksanakan	Diukur dari Jumlah Pembinaan yang dilaksanakan	Data Diolah

### INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

- Nama Jabatan : **Kepala Bagian TataLaksana**  
 Tugas Pokok : melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan  
 Fungsi :
  - 1 penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang Tata Usaha, TataLaksana Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
  - 2 penyiapan bahan pengoordinasian perumusankebijakan daerah di bidang Tata Usaha, Tata Laksana Pemerintahan dan Pelayanan Publik
  - 3 penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Tata Usaha, Tata Laksana Pemerintahan dan Pelayanan Publik
  - 4 penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Tata Usaha, Tata Laksana Pemerintahan dan Pelayanan Publik

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan/Penjelasan	Sumber Data
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Organisasi	Nilai Komponen Perencanaan Pada Evaluasi SAKIP	Diukur berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah oleh Inspektorat Daerah (komponen perencanaan) yang dilaksanakan pada tahun n	Inspektorat
2	Meningkatnya Kualitas Pelaporan Organisasi	Nilai Komponen Pelaporan pada Evaluasi SAKIP	Diukur berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah oleh Inspektorat Daerah (komponen Pelaporan) yang dilaksanakan pada tahun n	Inspektorat
3	Meningkatnya Pengawasan Internal Organisasi	Nilai Komponen Evaluasi Internal pada Evaluasi SAKIP	Diukur berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah oleh Inspektorat Daerah (komponen evaluasi internal) yang dilaksanakan pada tahun n	Inspektorat
4	Penempatan Pegawai sesuai dengan Peta	Persentase Pegawai sesuai dengan Peta Jabatan	(Jumlah Pegawai yang penempatannya sesuai Peta Jabatan : Jumlah semua Pegawai ) x 100%	Data diolah
5	Meningkatnya Pelayanan Umum dan Kepegawaian	Persentase layanan Administrasi Kepegawaian sesuai SOP	(Jumlah layanan administrasi kepegawaian sesuai SOP: Jumlah layanan administrasi kepegawaian tahun n) X 100%	Data diolah
		Persentase layanan surat menyurat sesuai SOP	(Jumlah layanan surat menyurat sesuai SOP: Jumlah layanan surat menyurat tahun n) X 100%	Data diolah
		Persentase Layanan Sapras sesuai SOP	(Jumlah layanan sarana prasarana sesuai SOP : Jumlah layanan sapras tahun n) X 100%	Data diolah
6	Meningkatnya Pengelolaan BMD	Persentase BMD dalam Kondisi Baik	(Jumlah BMD dalam kondisi baik/Jumlah BMD keseluruhan) X 100%	Data diolah
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sapras Pendukung Kinerja	(Jumlah Sapras Pendukung kinerja yang dipenuhi/Jumlah Sapras yang dibutuhkan) X 100%	Data diolah
7	Meningkatnya Kapasitas SDM Organisasi	Jumlah SDM yang mengikuti Pengembangan Kompetensi	Diukur dari Jumlah ASN di OPD yang sudah mengikuti Bimtek tahun n	Data diolah
8	Meningkatnya Inovasi yang diciptakan	Jumlah UKPP yang menciptakan Inovasi	Diukur dari Jumlah Jumlah UKPP yang menciptakan inovasi	Data diolah

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan/Penjelasan	Sumber Data
9	Meningkatnya UKPP yang memperbaiki Kualitas Pelayanan	Jumlah UKPP yang memperbaiki Kualitas Pelayanan	Diukur dari Jumlah UKPP yang memperbaiki Kualitas Pelayanan	Data diolah
10	Meningkatnya Perangkat Daerah yang menyusun SOP dan Probis	Jumlah Perangkat Daerah yang menyusun SOP dan Probis	Diukur dari Jumlah Perangkat Daerah yang menyusun SOP dan Probis	Data diolah
		Jumlah Perangkat Daerah yang menyusun Probis	Diukur dari Jumlah Perangkat Daerah yang menyusun Probis	Data diolah
11	Meningkatnya OPD yang melaksanakan aturan mekanisme koordinasi kerja yang sesuai aturan	Persentase OPD yang melaksanakan aturan mekanisme koordinasi kerja	(Jumlah OPD yang melaksanakan aturan mekanisme kerja : Jumlah OPD) X 100%	Data diolah

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU**

Nama Jabatan : **Analls Kepegawalan Pertama**

Tugas Pokok : melaksanakan kegiatan manajemen PNS dan pengembangan sistem manajemen PNS

- Fungsi
- 1 melaksanakan evaluasi jabatan dan verifikasi dokumen evaluasi jabatan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
  - 2 melaksanakan pembahasan dokumen SKJ Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera
  - 3 melaksanakan pembahasan/verifikasi data kebutuhan beban kerja perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan/Penjelasan	Sumber Data
1	Terlaksananya evaluasi Jabatan dan verifikasi dokumen evaluasi jabatan Perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	Jumlah hasil laporan pembahasan/verifikasi evaluasi jabatan	Jumlah hasil Laporan Evaluasi Jabatan Perangkat Daerah	Data Diolah
2	Terlaksananya pembahasan dokumen SKJ Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	Jumlah Perangkat Daerah yang melakukan pembahasan/verifikasi Standar Kompetensi jabatan	Jumlah Standar Kompetensi Jabatan Perangkat Daerah	Data Diolah
3	Terlaksananya pembahasan/verifikasi data kebutuhan beban kerja perangkat daerah di lingkungan Provinsi Sumatera Barat	Jumlah data jabatan pada perangkat daerah yang diverifikasi data kebutuhannya	Jumlah Data Jabatan	Data Diolah

## INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

Nama Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Pertama  
 Tugas Pokok : Melakukan Analisis dan Kajian Kebijakan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Baseline (2022)	Formula Perhitungan/ Penjelasan	Sumber Data
1	Tersusunnya analisis dan kajian kebijakan terkait penataan kelembagaan provinsi	analisis dan kajian dalam bentuk jumlah telaahan staf yang telah disusun	3 telaahan staf	diukur berdasarkan jumlah telaahan staf yang telah disusun	isu kebijakan yang dianalisis
2	terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan penataan kelembagaan provinsi	laporan monitoring pelaksanaan kebijakan kelembagaan provinsi	1 laporan	diukur berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan terhadap pelaksanaan kebijakan penataan kelembagaan perangkat daerah provinsi	Perangkat Daerah yang dilakukan monitoring dan evaluasi
3	tersusunnya rancangan peraturan tentang kebijakan penataan kelembagaan perangkat daerah	jumlah penataan kebijakan perangkat daerah dalam bentuk rancangan produk hukum daerah	1 pergub	diukur berdasarkan rancangan produk hukum yang telah diundangkan	sub bagian kelembagaan provinsi, biro hukum

## INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

Nama Jabatan : Analis Kebijakan ahli muda

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan/ Penjelasan	Sumber Data
1	Terlaksananya Penyusunan dokumen anjab, ABK, Evjab dan Standar Kompetensi Jabatan	Persentase perangkat daerah yang telah menyusun dokumen Anjab, ABK, Evjab dan SKJ	Diukur berdasarkan jumlah perangkat daerah yang Membuat dokumen Anjab, ABK, Evjab dan SKJ dan dilakukan pembahasannya dan disampaikan ke menpan	Data Diolah
2	Pembinaan penyusunan Anjab, ABK, Evjab dan SKJ ke Kab/Kota Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan penyusunan anjab, ABK, Evjab dan SKJ	diukur berdasarkan Jumlah kab/kota yang telah dilakukan monitoring dan pembinaan dalam penyusunan dokumen Anjab, ABK, Evjab dan SKJ berdasarkan peraturan kementerian teknis.	Data Diolah

## INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

**Nama Jabatan** : Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan

**Tugas Pokok** : Melaksanakan penyusunan kebijakan, koordinasi pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang Fasilitasi kelembagaan provinsi, penataan analisis jabatan dan fasilitasi kelembagaan kabupaten/kota

**Fungsi** : 1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Fasilitasi kelembagaan provinsi  
 2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang penataan analisis jabatan  
 3. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi kelembagaan kabupaten/kota

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Basellne	Formula Perhitungan/ Penjelasan	Sumber Data
1	Meningkatnya penataan jabatan	persentase PD Prov yang telah melakukan penataan jabatan	100%	diukur dari jumlah dokumen penataan jabatan yang sesuai dengan perubahan struktur organisasi	data diolah
		Persentase kab/kota yang telah dibina penataan jabatannya	100%		
2	Meningkatnya penataan perangkat daerah provinsi	Persentase perangkat daerah yang sesuai penetapan tipologinya	100%	diukur dari jumlah perangkat daerah yang akan ditata	data diolah
		Persentase perangkat daerah yang sesuai perumpunannya	100%		
3	Meningkatnya penataan perangkat daerah kab/kota	persentase kab/kota yang perangkat daerahnya sesuai tipologi	100%	(jumlah kab/kota yang mengusulkan penataan kelembagaan/jumlah kab/kota se sumatera barat) x 100%	data diolah
		persentase kab/kota yang sudah tepat perumpunan perangkat daerahnya	100%		

## INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

nama Jabatan : Analis Kepegawaian Pertama

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan/Penjelasan	Sumber Data
1	Tersusunnya Evaluasi Jabatan untuk Jabatan yang Kelas Jabatannya belum termuat dan juga tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur No. 46 Tahun 2019	<p>a. Jumlah inventarisasi jabatan pada instansi Pemerintah untuk memperoleh data/informasi jabatan</p> <p>b. Jumlah Berita Acara hasil validasi/verifikasi nilai dan kelas jabatan</p>	<p>diukur dari Jumlah Inventarisasi jabatan pada OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat</p> <p>Diukur dari Jumlah Berita Acara hasil Validasi/verifikasi nilai dan kelas jabatan</p>	<p>Data Diolah</p> <p>Data Diolah</p>
2	Terlaksananya penghitungan Kebutuhan Pegawai Jabatan Fungsional Pasca Penyederhanaan Birokrasi	a. Jumlah Verifikasi data penghitungan	diukur dari Jumlah Verifikasi data pada pembahasan verifikasi dokumen analisis jabatan dan analisis beban kerja OPD pada jabatan fungsional hasil penyetaraan Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	Data Diolah



## INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

Nama Jabatan : Sub Koordinator Kelembagaan Provinsi

Tugas Pokok : Melaksanakan penyusunan kebijakan, koordinasi pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang fasilitas kelembagaan provinsi

Fungsi : 1. Penyusunan bahan penyusunan kebijakan fasilitas kelembagaan provinsi  
2. Penyusunan bahan pengordinasian pelaksanaan fasilitas kelembagaan provinsi  
3. Pelaksanaan Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan fasilitas kelembagaan provinsi

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Baseline (2021)	Formula Perhitungan/ Penjelasan	Sumber Data
1	Meningkatnya penetapan kebijakan penataan kelembagaan provinsi	Jumlah kebijakan penataan kelembagaan provinsi yang telah ditetapkan dalam bentuk produk hukum daerah	1 Ranperda/Ranpergub	Jumlah produk hukum yang telah ditetapkan / diundangkan	sub bagian kelembagaan provinsi dan Biro Hukum